



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pegawai Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

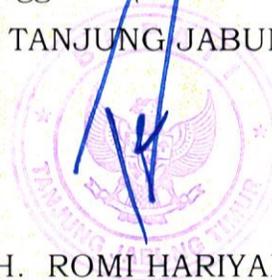
- KESATU : Menunjuk Pegawai Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pengguna Barang;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - o. melakukan stock opname barang persediaan;

- p. menyimpan dokumen, anantara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan Laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR **15** TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
 PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
1	1				6
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Kardani 19770522 200701 1 005	Fungsional Umum	Rahmat Gunawan 19840516 201001 1 003	Fungsional Umum
				Arijuni Hamzah 19830601 200604 1 014	Fungsional Umum
				Pembantu Pengurus Barang Bagian Pemerintahan	
				Jiono 19740308 201212 1 001	Fungsional Umum
				Pembantu Pengurus Barang Bagian Kesejahteraan Rakyat	
				Etyen SH 19840515 201001 1 020	Kasubag Perundang Undangan
				Pembantu Pengurus Barang Bagian Hukum	
				Dian Soraya SE 19800610 200212 2 002	Kasubag Penyusunan Program
				Pembantu Pengurus Barang Bagian Pembangunan	
				Yandri, A.Md 19780817 201101 1 007	Fungsional Umum
				Pembantu Pengurus Barang Bagian Ekonomi dan SDA	

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
2.	SEKRETARIAT DPRD	Rita Wati 19770122 200801 2 003	Fungsional Umum	Martiano 19750317 201408 1 001	Fungsional Umum
3.	INSPEKTORAT	Yatono, S.IK 19780103 200604 1 012	Auditor Pertama	Randi Anggelo, SE 19910317 201903 1 002	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Renita Noviyanti, SE 19801110 200701 2 006	Fungsional Umum	-	-
5.	BADAN KEUANGAN DAERAH	Partono 19790317 200212 1 003	Fungsional Umum	Hendra, SP 19831019 200701 1 001	Fungsional Umum
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ikatr Dimata, S.Pd 19761214 200903 1 003	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan	Rem Alirani, S.IP 19901027 202012 2 001	Fungsional Umum
7.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	Ahmad Habibi, A.Md 19791109 201001 1 011	Fungsional Umum	-	-
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Al Aziz Imamamura, SE 19780401 200012 1 001	Fungsional Umum	-	-
9.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nefratinova, S.Pd 19850224 200903 2 004	Kasubid Pengembangan Wilayah dan Prasarana	Darmawati 19680313 201408 2 004	Fungsional Umum
10.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Muhari, S.Sos 19830202 200801 1 002	Fungsional Umum	Sutradi 19820509 200906 1 001	Fungsional Umum

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
11.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Anang Triyono, SH 19830629 200701 1 002	Fungsional Umum	Karningsih, S.Kom 19820421 201001 2 024	Kasi Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Bagia Perkasa 19810902 200801 1 003	Fungsional Umum	Abdul Muqtadin, AM.KG 19840901 200903 1 009	Fungsional Umum
13.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Yatman Syuryadi 19790117 200901 1 000	Fungsional Umum	Suarnak 19830408 200801 1 002	Fungsional Umum
14.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Pathur Rahman, A.Md 19740103 200604 1 002	Fungsional Umum		
15.	DINAS PERIKANAN	R. Andro Wirawan, S.ST.Pi 19840126 201101 1 002	Kasi Kencelayanan dan Usaha Perikanan Tangkap	Khairil Fadhli Z. S.Kom 19811112 201001 1 010	Fungsional Umum
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Eddy Ibrahim Safari 19790111 199903 1 002	Fungsional Umum	Mutinah, A.Md 19841010 201101 2 018	Fungsional Umum
17.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Adrijal 19810618 200901 1 009	Fungsional Umum		
18.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sumardi, A.Md 19780220 200801 1 003	Fungsional Umum	Husnia Isngomah, S.Pdi 19801201 200803 2 001	Fungsional Umum
19.	DINAS KESEHATAN	Ika Setiani, AMF 19860310 200903 2 003	Fungsional Umum	Ramadhani Akbar, Am.kep 19870708 201001 1 004	Fungsional Umum
20.	DINAS PENDIDIKAN	Munira 19840810 201212 1 001	Fungsional Umum	Ngatijo 19790704 200701 1 020	Fungsional Umum
21.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Uljenia Manoi 19820901 201212 2 003	Fungsional Umum	Sugeng 19830812 201212 1 003	Fungsional Umum
22.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Abdul Rahman 19750829 200701 1 018	Fungsional Umum	Abdul Kadir 19720830 200901 1 004	Fungsional Umum
23.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Triawan 19720808 201212 1 001	Fungsional Umum	Avub 19660904 201212 1 001	Fungsional Umum

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
24.	DINAS PERHUBUNGAN	Rudiyanto, A.Md 19760315 200701 1 008	Fungsional Umum	Nop Modi 19801105 200604 1 018	Fungsional Umum
25.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tori Hartato, S.Kom 19800125 201001 1 010	Kasi Keamanan Informasi dan Sandi	Novendra Effendi, SH 19811128 201001 1 019	Kasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
26.	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Yogi Tuninggar, A.Md 19821102 201101 1 006	Fungsional Umum	Herma Novita Sari, SE 19841122 200212 2 002	Fungsional Umum
27.	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tri Wahyuni, SE 19820207 201001 2 017	Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi		
28.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Donal Ade Putra, S.Hut 19821216 201001 1 013	Kasi Penanganan dan Pengurangan Sampah	Opip Tomi, A.Md 19841029 200604 1 006	Fungsional Umum
29.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Abdul Gafar, SE 19831102 201001 1 011	Fungsional Umum	Novita Lisa, A.Md 19871116 201001 2 016	Fungsional Umum
30.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Mahroni 19850806 200701 1 004	Fungsional Umum	Mardius, A.Md 19820311 201101 1 011	Fungsional Umum
31.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Agus Sofian 19811029 200801 1 001	Fungsional Umum	Misgiorio 19730513 200312 1 002	Fungsional Umum
32.	RS MAHA SAKIT UMUM NEKADIN HAMZAH	Abdul Hamid, SKM 19801108 200803 1 001	Fungsional Umum	Mukjopo, And.Kep 19770712 201408 1 001	Fungsional Umum
33.	KANTOR CAMAT MUARA SABAK TIMUR	Made Riyanto 19850219 200901 003	Fungsional Umum	Sugito 19810421 200701 1 007	Fungsional Umum
34.	KANTOR CAMAT MUARA SABAK BARAT	Frans Fritra Budi, A.Md 19731025 200501 1 008	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		
35.	KANTOR CAMAT KUALA JAMBI	Jeki Romayzar, S.Pd 19850525 200604 1 001	Fungsional Umum	Abdullah 19800707 200701 1 002	Fungsional Umum
36.	KANTOR CAMAT MENDAHARA	Ari Rivana 19820615 200901 1 006	Fungsional Umum	Yuni Armin 19711010 200701 1 048	Fungsional Umum

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
37.	KANTOR CAMAT MENDAHARA III	Amud Subadi 19760316 200901 1 008	Fungsional Umum	Arif Dwi Saputra 19780930 20012 1 003	Fungsional Umum
38.	KANTOR CAMAT GERAGAI	Mulyadi 19750805 200701 1 035	Fungsional Umum	Akdekk 19750605 200906 1 001	Fungsional Umum
39.	KANTOR CAMAT DENDANG	Ifriansyah 19711221 199303 1 001	Kasi Trantib	Juprianta 19650602 200701 1 029	Fungsional Umum
40.	KANTOR CAMAT RANTAU RASAU	Chandra Hasholan Purba, SE 19790919 201101 1 006	Kasi Pemerintahan	Warsini 19820507 200901 1 009	Fungsional Umum
41.	KANTOR CAMAT BERBAK	Ruslan 19801111 201212 1 002	Fungsional Umum	Satria Perdana, SH 19840206 201101 1 004	Kasi Pemerintahan
42.	KANTOR CAMAT NIPAH PANJANG	Zubir 19720625 200906 1 002	Fungsional Umum	Abu Hanifah, HS, SE 19780115 201101 1 006	Fungsional Umum
43.	KANTOR CAMAT SADU	Sulfa, ST 19800214 201001 2 001	Fungsional Umum	Muhammad 19691212 200701 1 052	Fungsional Umum

BUPATI TANJUNGPINANG, JABUNG, TIMUR.



H. ROMI HARIYANTO